

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
1. Tujuan Penelitian .....	11
2. Kegunaan penelitian.....	11
D. Kerangka Konseptual .....	12
E. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Spesifikasi Penelitian .....	19
3. Jenis Data .....	20
4. Teknik Pengumpulan Data .....	21
5. Teknik Analisis Data .....	22
F. Sistematika Penulisan .....	22

## **BAB II : KERANGKA TEORETIS**

A. Perjanjian .....	25
1. Pengertian Perjanjian.....	25
2. Asas-Asas Perjanjian .....	31
3. Pelaksanaan Perjanjian .....	33
4. Macam- Macam Perjanjian .....	35
5. Berakhirnya Perjanjian .....	38
B. Perjanjian Kredit .....	39
C. Kredit Macet .....	43
D. Jaminan .....	46
1. Pengertian Jaminan dan Hukum Jaminan .....	46
2. Unsur dalam Hukum Jaminan.....	49
3. Penggolongan Jaminan.....	51
4. Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan .....	58
5. Hak Jaminan Kebendaan.....	91
E. Pembebanan Hipotek atas Kapal .....	95
1. Pengertian, Subjek dan Objek Hipotek Kapal .....	95
2. Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.....	102
3. Prosedur dan Syarat-Syarat Pembebanan Hipotek Kapal .....	107
4. Eksekusi Pembebanan Hipotek .....	111

## **BAB III : DATA HASIL PENELITIAN**

A. Kronologi Kasus .....	117
B. Latar Belakang Perusahaan.....	121
C. Wawancara dengan Narasumber .....	123

#### **BAB IV : ANALISIS**

- A. Pembebanan Hipotek Kapal sebagai Jaminan Utang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ..... 137
- B. Penyelesaian Eksekusi Hipotek Kapal Jika Terjadi Wanprestasi dan Kendala-Kendalanya ..... 144

#### **BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 151
  - B. Saran ..... 152
- DAFTAR PUSTAKA ..... 154

## ABSTRAK

- (A) Nama : Alifia Nashira
- (B) Judul Skripsi : Pembebanan Hipotek atas Kapal Laut Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ( Studi Kasus di PT. Intan Baruprana Finance Tahun 2020)
- (C) Halaman : x+ 150 + 22 + 2020
- (D) Kata Kunci : Jaminan, Hipotek Kapal, Kredit Macet
- (E) Isi :
- (F) Dalam era globalisasi yang semakin berkembang maka berkembang pula dengan jumlah perusahaan pelayaran di Indonesia yang meningkat. Meningkatnya jumlah armada kapal di Indonesia tidak dapat berjalan dengan mulus dikarenakan dibutuhkan modal dalam kegiatan perusahaan tersebut yang cukup besar. Dalam sektor pelayaran atau usaha angkutan laut kapal yang akan dijadikan sebagai alat usaha utama. Untuk mendapatkan modal yang besar diperlukanlah pinjaman kredit dari lembaga bank maupun non-bank. Pinjaman kredit ini harus di sertakan pulan dengan jaminan yang berupa kapal yang di bebaskan dengan pembebanan hipotek. Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pembebanan hipotek kapal yang diatur menurut undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran beserta akibat yang akan terjadi dalam proses jaminan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan cara meneliti melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam proses pembebanan hipotek pada kapal yang dibebaskan hipotek, kapal harus didaftarkan terlebih dahulu kedalam register kapal dan hanya kapal yang memiliki berat kotor 20 m<sup>3</sup> yang dapat dibebaskan dengan lembaga jaminan hipotek. Akibat yang akan terjadi dalam proses jaminan tersebut bahwa kapal yang dijaminan dapat dilakukan eksekusi oleh pihak kreditor. Hal ini disebabkan karena terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh pihak debitor karena tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan.
- (G) Acuan : 44 ( 1996-2020)
- (H) Pembimbing  
Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
- (I) Penulis

Alifia Nashira

## DAFTAR SINGKATAN

BAPPEBTI	adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
HGB	adalah Hak Guna Bangunan
INSA	adalah Indonesia National Shipowners Association
KPKNL	adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KUHD	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHPerdata	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PM	adalah Peraturan Menteri
SKMH	adalah Surat Kuasa Memasang Hipotek
UU	adalah Undang-Undang
UUHT	adalah Undang-Undang Hak Tanggungan
UUJF	adalah Undang-Undang Jaminan Fidusia
UUPA	adalah Undang-Undang Pokok Agraria

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Izin Penulisan Skripsi dan Penunjukkan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 3 Berita Acara Bimbingan
- Lampiran 4 Bukti Wawancara Ibu Ellies Daini, S.H., M.Kn.
- Lampiran 5 Bukti Wawancara Bapak Jimmy Tanal, S.H., M.Kn.
- Lampiran 6 Bukti Wawancara Ibu Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn. dan Bapak  
Nico Indra Sakti, S.H., M.Kn.
- Lampiran 7 Bukti Wawancara dengan Ibu Enike dan Bapak Taufik Selaku  
Syahbandar di Tanjung Priok
- Lampiran 8 Surat Keterangan Layak Terbit
- Lampiran 9 Surat Keterangan Trunitin Skripsi
- Lampiran 10 Surat Pernyataan Keabsahan dan Keaslian Penulisan Skripsi